



PROSEDUR AKUNTANSI PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN KLAIM  
JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN

**Ridho Okta Isnua<sup>1</sup>**  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
*ridhooktaisnuava@gmail.com*

**Isharijadi<sup>2</sup>**  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
*isharijadi@unipma.ac.id*

**Elly Astuti<sup>3</sup>**  
Pendidikan Akuntansi  
Universitas PGRI Madiun  
*ellyastuti@unipma.ac.id*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis Prosedur akuntansi untuk pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di kota Madiun. Jenis penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mekanisme sistem pengajuan klaim dan pembayaran klaim pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada. (2) Keefektifan sistem pengajuan klaim kurang efisien manfaatnya (3) Komponen Sistem Pengendalian Internal di BPJS Ketenagakerjaan sudah berjalan baik dan saling berhubungan yang meliputi lingkungan pengendalian internal, penilaian resiko, aktivitas pengendalian internal, informasi dan komunikasi.

Kata Kunci : Jaminan Hari Tua, Pengajuan, Pembayaran Klaim, dan Prosedur Akuntansi

**PENDAHULUAN**

Perusahaan Jasa Asuransi merupakan perusahaan yang menawarkan kepada pihak asuransi atau pihak tertanggung berupa jasa perlindungan terhadap sesuatu yang diasuransikan untuk mengantisipasi kerugian yang akan timbul pada masa mendatang. Hubungan dilakukan dengan baik antara pihak untuk memberikan perlindungan atau perusahaan asuransi dengan pihak tertanggung sehingga saling mendapatkan keuntungan. Menurut Bahari, A. F., & Basalamah, J. (2019) Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebagai asuransi perlindungan sosial seluruh pekerja di Indonesia memiliki empat produk utama. Setiap produk BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat dan keuntungan bagi pesertanya. Adapun peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah pemberi kerja, pekerja yang terikat hubungan kerja dan



**THE 18<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

pekerja perorangan. Jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak terbatas pada perusahaan dan karyawan saja, masyarakat perorangan pun bisa mendaftar selama dia mampu membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan asuransi jaminan hari tua sebagai perlindungan kepada pekerja di masa pensiunnya nanti. Namun demikian, sering kali pekerja pada perusahaan swasta tidak mendapatkan jaminan hari tua tersebut. Untuk itu BPJS menawarkan untuk melakukan pembayaran premi asuransi jaminan hari tua secara mandiri guna meningkatkan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat sebagai nasabah. Akan tetapi partisipasi masyarakat mandiri ataupun perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan relative rendah. Hal ini terjadi karena masih banyak orang yang belum percaya dan yakin kepada asuransi. Salah satu alasan utama yang sering dilontarkan adalah sulitnya proses klaim dan kurangnya edukasi mengenai prosedur pencairannya. Mulyadi (2016) menyatakan bahwa prosedur adalah serangkaian urutan yang telah disepakati dan disusun untuk melakukan proses tertentu dalam perusahaan.

Berdasarkan observasi awal di BPJS "Ketenagakerjaan Cabang Madiun, ditemukan bahwa sebelum proses pencairan klaim, dibutuhkan informasi pengeluaran kas yang memadai untuk pengendalian pembayarannya. Namun terkadang proses klaim dinilai agak kompleks karena ketika terjadi kekurangan data nasabah akan mengakibatkan proses antrian berulang yang akhirnya menumpuk untuk dilayani. Nasabah yang sudah mengantri ke customer service, namun karena kurangnya data-data yang dipersyaratkan, diarahkan untuk melengkapi dan mengatri kembali untuk ditindak lanjuti kembali.

Penelitian yang berkaitan dengan Prosedur akuntansi untuk pengajuan dan penyelenggaraan pembayaran klaim jaminan hari tua badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti Indah Fajar, (2019), Imam A (2013), Fransher Dady (2017) dan Putri W, Lina M (2019). Masalah yang dapat mengakibatkan klaim asuransi tersebut sulit dilaksanakan namun pada dasarnya bukan berarti asuransi ini bisa dikatakan menipu nasabah. Namun lebih kepada kurangnya wawasan nasabah dalam memahami bagaimana proses klaim asuransi sehingga merasa dipersulit. Berdasarkan analisis situasi tersebut, penelitian ini difokuskan kepada analisis pencatatan prosedur akuntansi untuk pengajuan dan



pembayaran klaim asuransi jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Madiun.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan observasi awal pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Madiun. Observasi awal dilakukan sekitar bulan April 2020. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada customer office, bagian kepala penata madya keuangan, karyawan penata madya keuangan, dan peserta yang akan mau mendaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan Kota Madiun untuk mengetahui prosedur akuntansi pada pengajuan dan pembayaran klaim asuransi jaminan hari tua. Teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data informasi dan menarik isi kesimpulan. Bila berdasarkan hasil wawancara dapat diterima dan di uji menggunakan teknik triangulasi maka hasil wawancara tersebut berkembang menjadi teori.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Menetapkan 2 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaksanakan program jaminan sosial nasional. BPJS Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan sedangkan BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi pemberi kerja dan pekerja penerima upah. Iuran Jaminan Hari Tua bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara sebesar 5,7% dari upah, dengan ketentuan :

- 2 % ditanggung oleh pekerja
- 3,7 % ditanggung oleh pemberi kerja

Sistem Pengendalian Internal sudah berfungsi dengan efektif melalui eksistensi (present) dan berfungsinya seluruh prinsip-prinsip yang mendukung komponen serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah serta keandalan dalam pelaporan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan kepada prosedur sistem akuntansi dalam pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua di



**THE 18<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun yang sudah diterapkan masuk di dalam sebuah pelaksanaan prosedur pengajuan klaim dan pembayaran klaim jaminan hari tua yang tersedia di peserta jaminan hari tua. Dalam melaksanakan sistem pengajuan klaim dan pembayaran klaim jaminan hari tua. Kemudian keefektifan sistem pengajuan klaim dan pembayaran klaim jaminan hari tua kurang berjalan dengan baik pemanfaatannya jaminan hari tua dikarenakan peserta kebanyakan mengajukan klaim langsung datang ke kantor cabang tidak melalui online. Selanjutnya perhitungan saldo akhir jaminan hari tua belum sesuai peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2015 dan sistem pengendalian internal sudah berjalan baik dengan komposisinya.

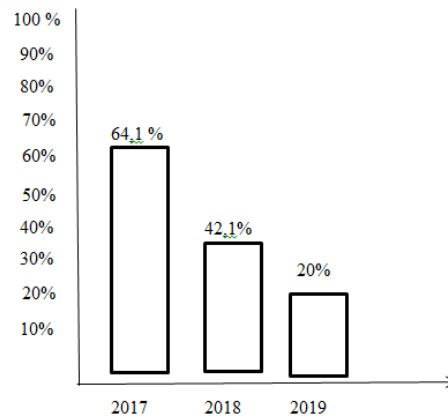
Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No 109 Tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial pasal 3 dinyatakan bahwa peserta program jaminan sosial terdiri atas penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Pada pasal 4 perpres tersebut juga menjelaskan peserta menerima upah adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara. Berikut ini tabel yang menunjukkan besarnya total kepesertaan aktif, peserta penerima upah dan bukan penerima upah BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 1 Total Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan

TAHUN	Total Peserta Jaminan Hari Tua	Jumlah Berkas Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua	Persentase Iuran	Total Bulan Iuran	Persentase dalam bentuk Bunga per tahun	Saldo Akhir
2017	145.087,430,550.00	18723	5,70%	12	64,1%	Rp.1.132.917,41
2018	123,834,445,080.00	10862	5,70%	12	42,1%	Rp.5.415.334,32
2019	113,081,437,050.00	8127	5,70%	12	20%	Rp.6.609.287,88

Berdasarkan Tabel 1, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan cenderung menurun selama periode 2017-2019. BPJS Ketenagakerjaan mengalami penurunan kepercayaan peserta pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan Gambar 1, komposisi kepesertaan jaminan hari tua di dominasi oleh peserta yang mendaftar pada tahun 2017 yang mencapai 64% peserta di Kota Madiun yang mendaftarkan akan tetapi jumlah mengalami penurunan drastis di tahun 2019 sebesar 20 %. Presentase dalam bentuk bunga per tahun diperoleh dari analisa yang di paparkan data pada saat

melakukan observasi pada kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun. Berikut Grafik yang menjelaskan mengenai penurunan yang terjadi pada tahun 2017-2019.



Gambar 1. Grafik Proporsi Iuran Peserta Jaminan Hari Tua

Pada Grafik 1 tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang sangat signifikan. Hal tersebut terjadi karena prosedur sistem pengajuan klaim dan pembayaran klaim jaminan hari tua. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun memiliki kelengkapan yang sangat baik terkait prosedural. Kendala terletak pada keterbatasan informasi yang diperoleh peserta, sehingga menjadikan peserta mencairkan saldo jaminan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan di usia muda, sedangkan saldo tersebut dapat bertambah jika tidak dicairkan di masa itu.

A. Proses melaksanakan prosedur sistem akuntansi pengajuan klaim dan penyelenggaraan pembayaran klaim dalam jaminan hari tua Prosedur di BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun sebagai berikut :

- 1) Peserta mengisi formulir pengajuan jaminan hari tua
- 2) mengecek kelengkapan dokumen peserta dengan menggunakan map checklist
- 3) meletakkan dokumen di dalam dropbox untuk dicek oleh pemeriksa dokumen
- 4) Dapatkan nomor antrian sesuai tujuan kedatangan peserta
- 5) Verifikasi data diri ketika dipanggil oleh petugas pelayanan
- 6) Terima tanda bukti transaksi

B. Beberapa fungsi yang terlibat dalam pembayaran klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Kota madiun adalah:



**THE 18<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

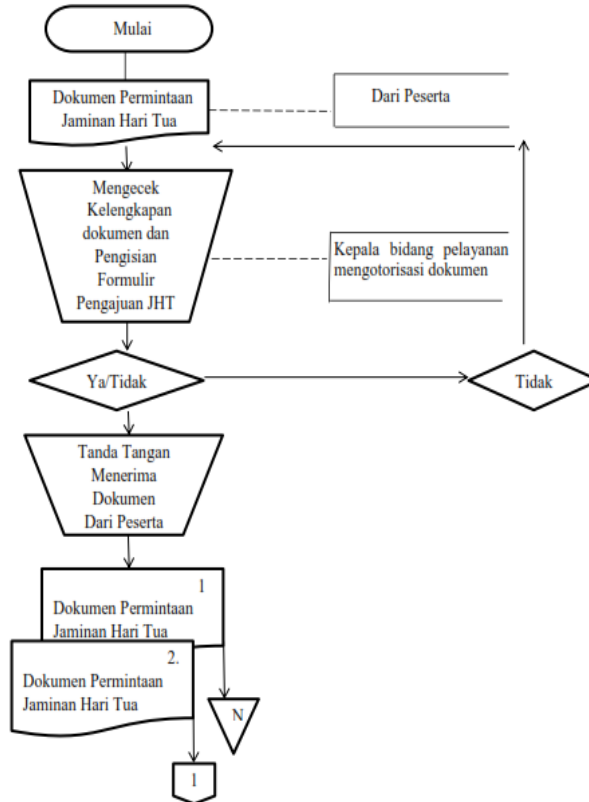
---

- 1) *Customer Office* adalah karyawan yang melayani peserta jaminan hari tua secara langsung ketika peserta mengajukan pembayaran klaim jaminan hari tua.
- 2) *Pemeriksa Account Reprenstative Khusus* adalah karyawan yang memberikan penetapan jaminan hari tua.
- 3) *Bagian Penata Madya Keuangan* adalah bagian yang membuat cek
- 4) *Pemeriksa Account Represntative* adalah bagian yang mengeluarkan pembayaran jaminan hari tua serta mencatat kas yang keluar tiap transaksi
- 5) *Penata Madya Administrasi Kepesertaan* adalah karyawan yang melayani pembayaran jaminan hari tua pada kantor BPJS Ketenagakerjaan baik secara tunai maupun transfer.

Adapun proses tersebut meliputi beberapa bagian, dengan mekanisme seperti yang dijelaskan pada Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7.

- 1) *Pembayaran Menerima Permintaan Jaminan Hari Tua di bagian Customer Office*
  - a) Menyerahkan formulir dokumen yang sudah dicatat oleh peserta. Formulir dokumen berjumlah dua formulir dokumen beserta dokumen pendukung lain yang akan diterima pada bagian customer office.
  - b) Mengecek kelengkapan dokumen dan mengisi dokumen formulir berjumlah dua yang diajukan pendaftaran peserta. Namun jika dokumen itu menemukan kesalahan atau kekurangan dalam mengisi dokumen tersebut bagian customer office akan dikembalikan lagi dokumen tersebut pada peserta untuk kembali melengkapi. Setelah itu di otorisasikan pada kepala bidang pelayanan klaim pembayaran jaminan hari tua.
  - c) Merancang formulir dokumen yang akan di tanda tangani dokumen yang telah diterima sebagai adanya bukti sudah clear lengkap formulir dokumen yang didaftarkan.
  - d) Penetapan jumlah jaminan hari tua dan untuk menganalisis semua formulir dokumen dan diserahkan kepada kepala Bidang Kepesertaan

Bagian Customer Officer  
 Gambar 1 : flowchart Penerimaan Permintaan Jaminan Hari Tua

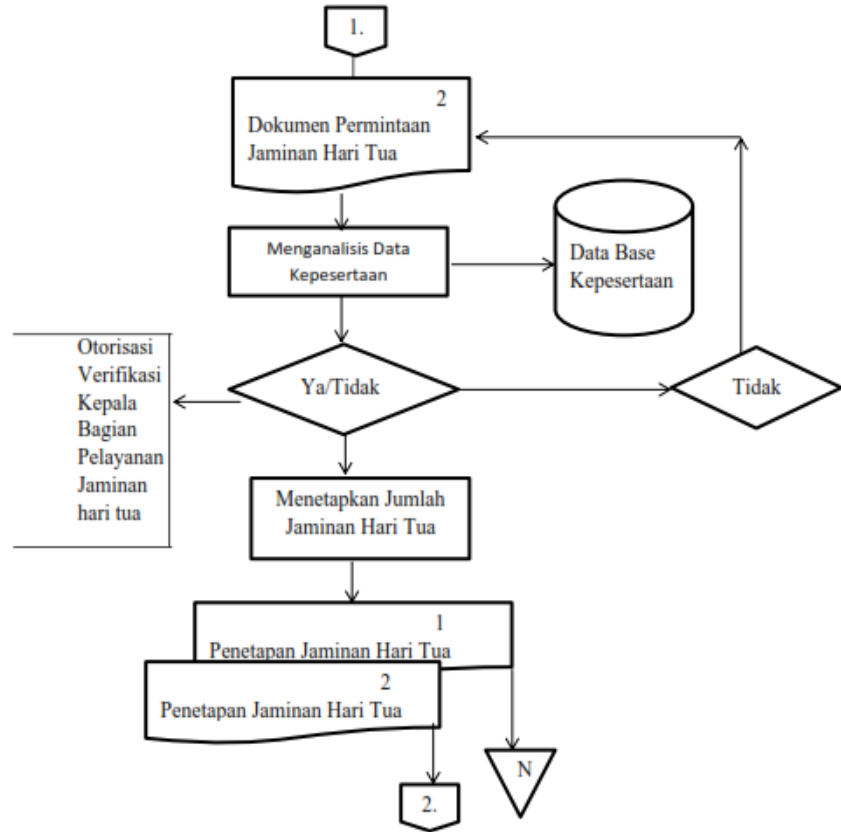


2) Bagian Penata Madya Pelayanan

- a) Bagian penata madya pelayanan menerima formulir dokumen dari customer office
- b) Data peserta akan dianalisis secara otomatis secara Komputer
- c) Bagian penata madya pelayanan sesudah menganalisa langsung penetapan jumlah jaminan hari tua yang nanti akan diserahkan dan di otorisasikan oleh kepala bidang pelayanan
- d) Merancang rangkap dua dokumen yang sudah ditetapkan oleh pemeriksa jaminan hari tua penata madya pelayanan .
- e) Bagian Penata Madya Pelayanan menerima dokumen yang akan diserahkan pada bagian pemeriksa jaminan hari tua Account Representative Khusus.

**Bagian Pemeriksaan Jaminan Hari Tua Penata Madya Pelayanan**

**Gambar 2 : Flowchart Penetapan Jaminan Hari Tua**



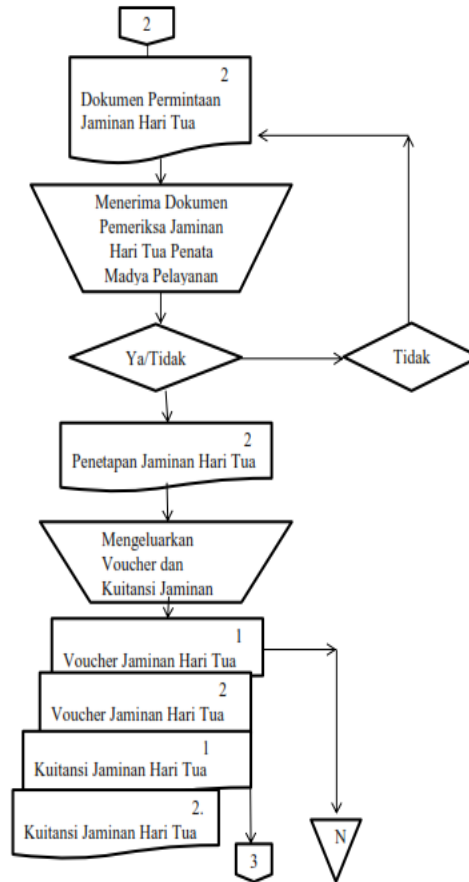
3) Bagian Pemeriksa Account Representative khusus

- a) Mengecek kembali dokumen yang telah diterima dari bagian pemeriksa jaminan hari tua Penata Madya Pelayanan.
- b) Mengeluarkan voucher jaminan hari tua rangkap dua dan mengeluarkan kuitansi atau kuitansi jaminan hari tua rangkap dua
- c) Dokumen yang sudah ditetapkan jaminan hari tua, tanda tangan terima dokumen, kuitansi atau bukti pembayaran jaminan hari tua dan voucher langsung diserahkan bagian keuangan



Bagian Pemeriksaan Pemeriksa Account Representative khusus

Gambar 3: Flowchart penerbitkan voucher dan bukti pembayaran JHT



4) Bagian Penata Madya Keuangan

- a) Bagian penata madya keuangan akan menerima dokumen formulir pengajuan permintaann jaminan hari tua, menetapkan dokumen jaminan hari tua, tanda tangan terima, kuitansi atau bukti pembayaran, dan vouchet jaminan hari tua
- b) Mengecek ulang semua dokumen tersebut sudah lengkap atau belum dan sudah sesuai prosedur yang lengkap kemudian membuat cek untuk mengisi yang sudah sesuai aturan nominal sudah ditetapkan dan kepala bagian keuangan mengotorisasikan yang sudah ditetapkan
- c) Dokumen permintaan pengajuan jaminan hari tua, tanda tangan terima, voucher jaminan hari tua rangkap dua kuitansi atau bukti pembayaran rangkap dua menetapkan jaminan hari tua nomer dari salah satu dokumen akan di arsipkan permanen berdasarkan tanggal pengajuan.



- d) Menetapkan jaminan hari tua nomer dua, voucher jaminan hari tua rangkap dua kuitansi bukti pembayaran rangkap dua, beserta cek, akan diserahkan kebagian penata madya kepesertaan

Pada saat Pemeriksaan *Account Representative* Khusus menetapkan jaminan semua data direkam dan dimasukkan kedalam jurnal pengeluaran kas di tiap transaksi. Proses tersebut harus memperhatikan beberapa pengendalian yang dilakukan. Sistem Pengendalian internal sudah baik, namun pengendalian internal harus tetap dilaksanakan ketika saat pencairan saldo dana jaminan hari tua berjalan dengan baik berikut ini beberapa komponen kegiatan sistem pengendalian internal sebagai berikut:

- a) Lingkungan pengendalian internal.

Lingkungan pengendalian internal sudah cukup mendukung dikarenakan lingkungan pengendalian internal sudah sesuai standar, proses klaim pencairan saldo dana jaminan hari tua juga berjalan dengan baik dan struktur organisasi berjalan dengan baik saling bekerja sama.

- b) Penilaian resiko

Penaksiran Resiko yang dilakukan pada karyawan dan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menggunakan beberapa komponen standar pelayanan dalam penilaian kinerjanya yang memberlakukan pada sistem akuntansi pembayaran klaim jaminan hari tua dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam melakukan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun, Berikut ini beberapa penaksiran resiko prosedur akuntansi pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun:

- c) Kendala dalam proses pembayaran klaim jaminan hari tua.

Kendala proses pembayaran jaminan hari tua dana sering kali belum cair dikarenakan masih bergantung proses pencairan dana sesuai pendaftaran peserta

Adanya perbedaan waktu saat pencairan dana program Jaminan hari tua dengan Program Lainnya dan keluhan pembayaran klaim. Perbedaan waktu disini ketika pencairan saldo dana tidak sesuai waktu yang ditetapkan dan jatuh tempo. Untuk itu bisa berakibat kepercayaan nasabah BPJS Ketenagakerjaan

- d) Kegiatan Pengendalian internal

kegiatan pengendalian internal sudah mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilakukannya arahan manajemen dalam rangka meminimalkan resiko atas pencapaian tujuan

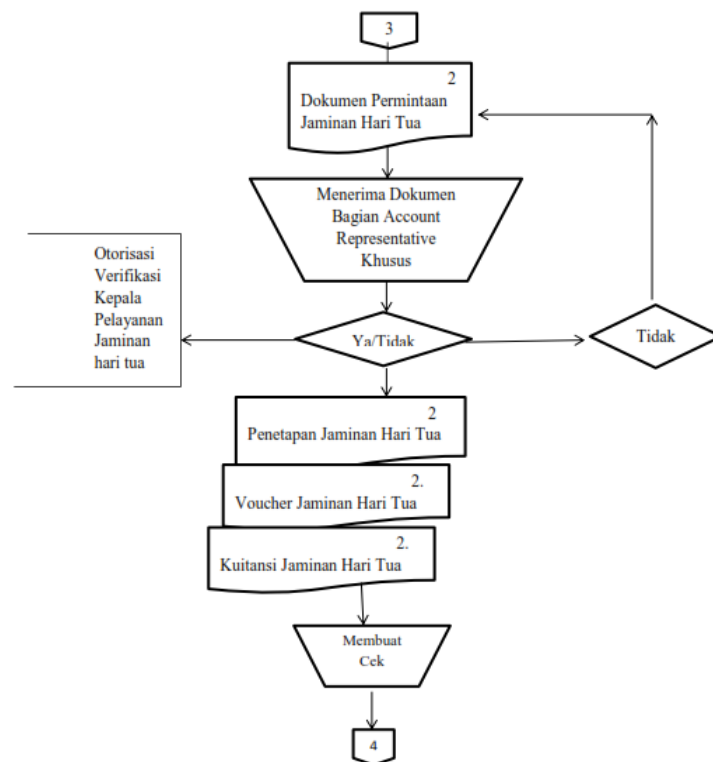
e) Informasi dan Komunikasi

informasi dan komunikasi sudah baik karena peserta bisa melihat dan mengakses web halaman resmi bpjs ketenagakerjaan di ([www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)) serta bisa melihat aplikasi layanan informasi tracking klaim jaminan hari tua

f) Kegiatan Pemantuan

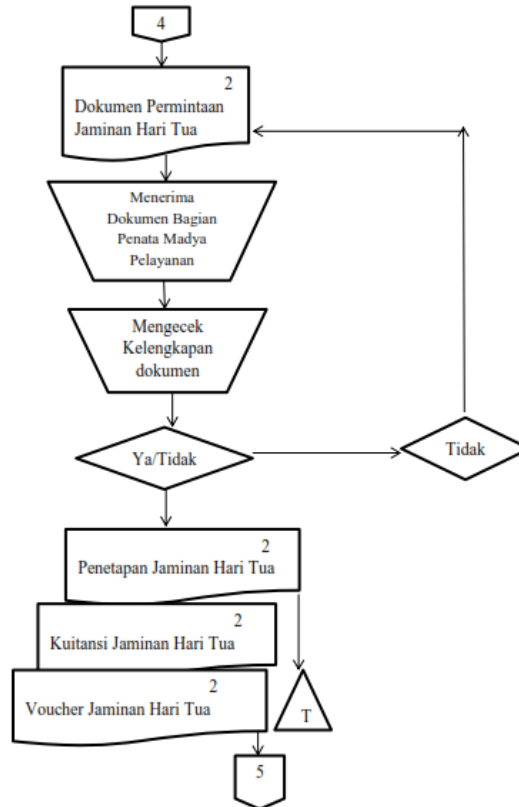
kegiatan pemantuan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Bagian Penata Madya Keuangan  
 Gambar 4 : Flowchart pembuatan cek



**Bagian Penata Madya Keuangan**

**Gambar 5 : Flowchart pembuatan cek ( Lanjutan)**

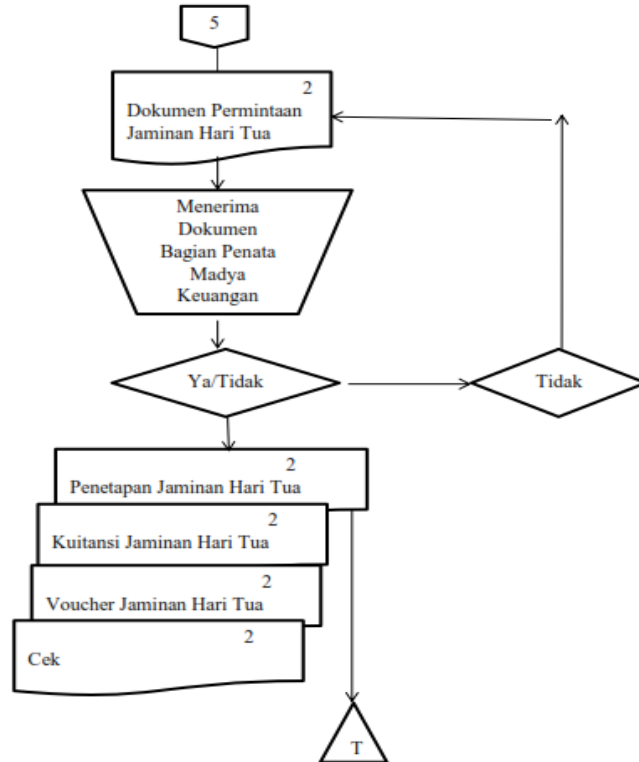


**5) Bagian Penata Madya Administrasi Kepesertaan**

- a) Bagian Penata Madya Administrasi Kepesertaan menerima dokumen yang sudah ditetapkan pengajuan jaminan hari tua rangkap dua menerima voucher rangkap tiga beserta cek dari bagian penata madya keuangan
- b) Dokumen pendukung lain akan dicek kembali berkas tersebut jika sudah benar dan lengkap.
- c) Peserta akan menerima uang yang sudah dibayarkan ketika mau mengambil uang jaminan hari tua beserta dokumen yang sudah ditetapkan jaminan hari tua, voucher jaminan hari tua dua, dan cek beserta bukti pembayaran atau kuitansi
- d) Bagian Keuangan langsung mengecek ulang kembali dengan menerima dokumen lengkap beserta dokumen pendukung, bukti pembayaran, dokumen yang sudah ditetapkan, dan voucher jaminan semua dokumen tersebut akan diarsip sebagai cadangan dokumen.

**Bagian Penata Madya Administrasi Kepesertaan**

**Gambar 6: Flowchart pembayaran Jaminan Hari Tua Tunal**



C. Dokumen yang digunakan dalam Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun adalah:

- 1) Pengajuan Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua
- 2) Penetapan Jaminan Hari Tua
- 3) Bukti Pembayaran atau Kuitansi Jaminan Hari Tua
- 4) Voucher, dan cek

D. Pencatatan yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Buku Pengeluaran Pada Kas Harian

Mencatat transaksi pengeluaran kas yang terjadi setiap hari menggunakan buku pengeluaran pada kas harian

- 2) Jurnal Pengeluaran Kas

Berdasarkan Flowchart atau ke lima (5) bagan alur diatas dapat dijabarkan mengenai prosedur akuntansi pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua diBPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun, sebagai berikut:

- a) Mekanisme pencairan klaim dana jaminan hari tua oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dalam Mekanisme pencairan klaim dana oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan pelaksanaan jaminan hari tua, klaim pembayaran tidak dibayarkan oleh pemerintah, tetapi diserahkan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen klaim akan diverifikasi oleh verifikasi jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pihak verifikasi jaminan hari tua menyetujui maka klaim akan diganti oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, jika tidak disetujui maka klaim akan dikembalikan ke pihak peserta sebagai pedoman pelaksanaan program jaminan hari tua. Dokumen klaim akan diverifikasi oleh verifikasi jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Apabila pihak verifikasi jaminan hari tua menyetujui maka klaim akan diganti oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, jika tidak disetujui maka klaim akan dikembalikan ke pihak peserta sebagai pedoman pelaksanaan program jaminan hari tua.
- b) Keefektifan Sistem klaim pencairan saldo dana anggaran untuk aspek keuangan BPJS Ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab langsung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pencairan saldo dana jaminan hari tua kepada peserta. Kondisi saat ini yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan menggunakan pencairan dana secara bertahap sesuai kondisi keuangan yang ada. Kondisi sarana prasarana, berdasarkan hasil penelitian maka sarana prasarana yang disediakan pihak BPJS Ketenagakerjaan telah mengalami perkembangan, dimana tidak hanya dari sisi jumlah namun juga kualitas yang disediakan. Namun dalam perkembangan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meningkat menyebabkan kebutuhan untuk mengembangkan sarana prasarana tersebut. Salah satu faktor yang dianggap harus segera mendapatkan perhatian penting seiring lonjakan peserta yang akan mendaftar jaminan hari tua dilihat kondisi sarana dan prasarana. Dalam hal ini peserta telah merasakan bahwa sarana prasarana untuk mendaftarkan jaminan hari tua sudah cukup baik.



**THE 18<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

---

- c) Cara Menghitung Total peserta jaminan hari tua dengan jumlah berkas pengajuan klaim jaminan hari tua pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun.

### **SIMPULAN**

Pelaksanaan sistem pengajuan klaim jaminan hari tua yang “ada di BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun pada umumnya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Keefektifan sistem pengajuan klaim dan pembayaran klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan kota madiun kurang efisien manfaatnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang melakukan pengajuan klaim hanya di kantor cabang padahal untuk melakukan klaim peserta memiliki dua cara yaitu melalui kantor cabang kota madiun, dan melalui online. Menghitung total keseluruhan peserta jaminan hari tua jika peserta melakukan klaim di usia muda atau usia tua di BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun.

Penelitian ini hanya berfokus pada pembahasan mengenai prosedur akuntansi untuk pengajuan dan pembayaran klaim jaminan hari tua badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di kota Madiun. Tahun penelitian hanya difokuskan pada tahun 2017-2019, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian penelitian mulai dari topik pembahasan hingga penambahan variabel seperti penerapan kebijakan prosedur sesuai undang-undang BPJS Ketenagakerjaan, dan penambahan objek penelitian sebagai pembanding atas penilaian kinerja kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Madiun.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bahari, A. F., & Basalamah, J. (2019). Analisis Kualitas Produk, Kualitas Layanan Dan Customer Relationship Management Serta Dampaknya pada Kepuasan Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(1), 11-21.
- Dady, F. (2017). Analisis Sistem Akuntansi Dan Prosedur Pembayaran Klaim Jaminan Kematian Pada Pt. Taspen (Persero) Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 63-72.
- Hidayah, LN, & Santoso, T. (2015). Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (Studi tentang penyediaan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di Kantor BPJS Cabang Rungkut Surabaya). *JAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1 (01).
- Imam A (2013) Evaluasi Sistem Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua pada PT Jamsostek (Persero) Cabang Yogyakarta Tahun 2013, *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13 (04), 50-55



**THE 18<sup>th</sup> FIPA**  
**FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP**  
**UNIVERSITAS PGRI MADIUN**

- Indah F. (2019) Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa Studi Kasus Tenaga Kerja Pensiun dan Mengundurkan diri Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi, 10(02), 56-60
- Kemendes.2014. Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta
- Mulyadi. 2016.Sistem Akuntansi (4th ed). Jakarta . Salemba Empat
- Niah, NS (2016). Pelaksanaan Kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Di Kabupaten Jombang. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 2 (01).
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Cara dan Persyaratan
- Purba, T. A. (2016). Pelaksanaan Program Keselamatan Kerja Sebagai Komponen BPJS Ketenagakerjaan DI PT. Madubaru PG Madukismo Yogyakarta.Jurnal Manajemen Bisnis, 6(1), 49-62.
- Putri W, Lina M (2019) Implementasi Kebijakan Manfaat Jaminan Hari Tua di provinsi gorontalo. Going Concern :Jurnal Riset Akuntansi, 11(03), 45-50
- Riah, J. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Pembayaran Klaim Jaminan Hari Tua Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Economics Bosowa, 4(004), 102-116.
- Rosyadi, F. (2017). Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di Puskesmas Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 3 (1).
- Sholiha, A. F., & Warsono, H. (2018).Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan hari Tua Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Ungaran. Journal Of Public Policy And Management Review, 7(4), 180-191.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

